

EFFECTIVENESS OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE

Neni Nurhayati^{1*}, Dendi Purnama², Arum Sekaraji³

¹²³Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

neni.nurhayati@uniku.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to produce a model that can explain the influence of Intergovernmental Revenue, Capital Expenditure, Regional Wealth Level and Size of Regional Government on Regional Government Financial Performance. This research method uses descriptive and verification methods. The population of this study, namely the Budget and Balance Sheet Realization Reports for all districts in the Nusa Tenggara Islands for the 2016-2020 period, was obtained as many as 37 districts. The technique of determining the sample uses a saturated sample. The data analysis technique used is panel data regression analysis. The results showed that Intergovernmental Revenue, Capital Expenditures, Level of Regional Wealth and Size of Local Governments had a positive effect on the Financial Performance of Local Governments.

Keywords: Regional Government Financial Performance, Intergovernmental Revenue, Capital Expenditure, Regional Wealth Level, Size of Regional Government

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model yang dapat menjelaskan pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Belanja Modal, Tingkat Kekayaan Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca pada seluruh kabupaten di Kepulauan Nusa Tenggara Periode 2016-2020 diperoleh sebanyak 37 kabupaten. Teknik penentuan sampel menggunakan sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Intergovernmental Revenue*, Belanja Modal, Tingkat Kekayaan Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Keywords: kinerja keuangan pemerintah daerah, *Intergovernmental Revenue*, belanja modal, tingkat kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu perwujudan dari pergeseran sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Dengan adanya sistem desentralisasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemberian desentralisasi dan otonomi yang luas akan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah agar terus berinovasi dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerahnya (Novia & Kartim, 2019). Dalam pelaksanaan otonomi daerah menggunakan pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dibanding

kemampuan daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tersebut maka dalam pelaksanaan pemerintah daerah harus mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sehingga dengan adanya otonomi daerah aspirasi masyarakat akan mudah tersalurkan, daerah lebih maju, mandiri, dapat mensejahterakan masyarakat dan terwujudnya *good governance*.

Good governance merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Permintaan dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah agar terselenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan

masyarakat serta menuntut adanya keterbukaan. Pemerintah daerah yang baik menunjukkan dalam penerapan prinsip *good governance* berjalan dengan baik (Bambang & Handi, 2016). Dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) pemerintah harus tetap melakukan usaha-usaha dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang harus dijalankan oleh setiap daerah di Indonesia. Salah satu kunci penentu keberhasilan dan kesuksesan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu dalam pengelolaan keuangan. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal akan terjamin terciptanya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah (Sari & Mustanda, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 37 (perubahan kedua dari Permendagri No.13 Tahun 2006) menyebutkan kinerja adalah hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan merupakan indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Analisis kinerja keuangan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana alur keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Darwanis & Saputra, 2014). Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya dilihat dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi daerahnya (Sukma & Panji, 2018).

Pengukuran kinerja keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Menurut Pramono (2014), rasio

efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi rill. Pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, tetapi semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Mahsun (2009), kriteria rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Kriteria Penilaian Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas
Tidak Efektif	< 100%
Efektif Berimbang	= 100%
Efektif	> 100%

Sumber : Mahsun (2009:187)

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten di Kepulauan Nusa Tenggara tahun anggaran 2016-2020 masih kurang, terdapat daerah yang tidak efektif. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
1	Badung	121%	109%	80%	71%	26%	81%
2	Bangli	114%	89%	102%	91%	29%	85%
3	Buleleng	103%	129%	90%	83%	39%	89%
4	Gianyar	118%	114%	111%	101%	27%	94%
5	Jembrana	130%	101%	99%	102%	48%	96%
6	Karangasem	100%	85%	86%	84%	45%	80%
7	Klungkung	130%	124%	123%	125%	42%	109%
8	Tabanan	117%	130%	89%	91%	31%	92%
9	Bima	102%	156%	62%	97%	43%	92%
10	Dompu	105%	177%	105%	104%	42%	107%
11	Lombok Barat	92%	122%	72%	88%	37%	82%
12	Lombok Tengah	103%	168%	104%	103%	35%	102%
13	Lombok Timur	93%	148%	89%	98%	45%	95%
14	Sumbawa	96%	179%	100%	110%	36%	104%
15	Sumbawa Barat	144%	401%	117%	107%	39%	161%

16	Kab. Lombok Utara	178%	111%	66%	79%	12%	89%
17	Alor	102%	156%	109%	84%	33%	97%
18	Belu	120%	172%	129%	107%	33%	112%
19	Ende	110%	162%	77%	88%	15%	99%
20	Flores Timur	86%	108%	94%	83%	18%	78%
21	Kupang	76%	118%	66%	85%	16%	72%
22	Lembata	118%	124%	117%	70%	12%	88%
23	Manggarai	94%	134%	92%	106%	7%	87%
24	Ngada	143%	138%	88%	100%	7%	95%
25	Sikka	85%	104%	97%	96%	11%	78%
26	Sumba Barat	116%	150%	104%	81%	25%	95%
27	Sumba Timur	95%	113%	77%	104%	30%	84%
28	Timor Tengah Selatan	100%	273%	83%	84%	18%	111%
29	Timor Tengah Utara	114%	184%	85%	96%	33%	102%
30	Rote Ndao	101%	165%	108%	112%	45%	106%
31	Manggarai Barat	120%	126%	86%	103%	16%	90%
32	Nagekeo	105%	156%	110%	101%	9%	96%
33	Sumba Tengah	100%	243%	96%	111%	24%	115%
34	Sumba Barat Daya	113%	123%	104%	112%	34%	97%
35	Manggarai Timur	133%	180%	87%	88%	15%	101%
36	Sabu Raijua	63%	69%	47%	40%	16%	49%
37	Malaka	125%	201%	105%	96%	24%	110%

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (Data Diolah Peneliti, 2022)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil perhitungan rasio efektivitas daerah pada Kabupaten di Kepulauan Nusa Tenggara selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari periode 2016 s/d 2020 menunjukkan rata-rata rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten di Kepulauan Nusa Tenggara masih kurang, terdapat 25 Kabupaten yang dikategorikan tidak efektif atau kurang dari 100% (<100%). Sedangkan menurut Mahsun (2009) menyatakan bahwa pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio efektivitas yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat Kabupaten di Kepulauan Nusa Tenggara tingkat efektivitas selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari periode 2016 s/d 2020 dibawah

atau kurang dari 100% yang artinya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum sesuai atau kurang dari target penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah belanja modal, ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah (Sukma et al., 2021). Adapun faktor lainnya adalah tingkat kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, pendapatan pajak daerah dan temuan audit (Nugraheni & Adi, 2020). Sedangkan faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Intergovernmental Revenue*, Belanja Modal, Tingkat Kekayaan Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah.

Intergovernmental Revenue merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick, 2007). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan demikian semakin besar dana perimbangan akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Penelitian terkait pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Dasmardkk. (2020), Nugroho dan Prasetyo (2018) serta Pratama dkk. (2022) yang menyatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan pernyataan Novia dan Kartim (2019) serta Aswar (2019) menyatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Belanja modal merupakan salah satu kegiatan belanja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan aktiva tetap dan dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang (Mohammed *et.al.*, 2015). Ayinde *et.al.* (2015) dan Basrudin (2011) menyatakan bahwa kegiatan belanja modal ditunjukan untuk membiayai proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakatnya. Belanja modal dapat dikatakan sebagai kegiatan investasi yang dilakukan pemerintah daerah, tetapi kegiatan belanja

modal pada pemerintah daerah tidak bertujuan untuk mencari profit. Tingginya belanja modal menyebabkan semakin tinggi pula produktivitas perekonomian yang dalam hal ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah (Darwanis & Saputra, 2014). Meskipun belanja modal dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian, pemerintah daerah harus tetap mengontrol dan menyesuaikan belanja daerahnya agar tidak melebihi dari pendapatan yang dimiliki. Penelitian terkait pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Kirana dan Sulardi (2020) serta Sari dkk. (2020) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan pernyataan Nauw dan Riharjo (2021) serta Cahyono dan Aisy (2021) menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Tingkat kekayaan daerah merupakan kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda. Mustika dan Fitriyani (2012) menyatakan salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Tingkat kekayaan daerah merefleksikan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerah. Peningkatan PAD diharapkan menjadi stimulus peningkatan pertumbuhan ekonomi (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Penelitian terkait pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Defitri, *et.al* (2020), Nugraheni dan Adi (2020) serta Anggraini dkk. (2019) yang menyatakan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan pernyataan Mappiasse (2018) serta Utama (2019) menyatakan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah

tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Size (Ukuran Pemerintah Daerah) merupakan besar atau kecilnya pemerintah yang ditunjukkan dengan besarnya aset pemerintah daerah (Noviyanti dan Kiswanto, 2016). *Size* yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah untuk kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012). Indikator untuk menggambarkan *size* adalah dari total aset pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Menurut Sumarjo (2010) semakin besar ukuran pemda maka pemda akan lebih dituntut untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Penelitian terkait pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Rahmawaty (2020), Kirana (2020) serta Natoen dkk. (2019) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan pernyataan Nugroho dkk. (2018) serta Saraswati dan Rioni (2019) bahwa Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rostika (2020) yang meneliti tentang Pengaruh Ukuran Legislatif, Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen yaitu *Intergovernmental Revenue*, Belanja Modal dan juga objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu pada Kabupaten di Kepulauan Nusa Tenggara periode 2016-2020. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengasilkan model penelitian yang dapat menjelaskan pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Belanja Modal, Tingkat Kekayaan Daerah dan Aset Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Aulia dan Rahmawaty 2020, keagenan merupakan suatu perjanjian antara *principal* dan *agent*, yaitu dengan pemberian beberapa kekuasaan kepada *agent* untuk pengambilan keputusan. *Principal* merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh *agent*. Sedangkan *agent* merupakan pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak *principal* (Halim, 2012).

Banyak permasalahan yang sering muncul dalam teori keagenan (*agency theory*) salah satunya asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi merupakan keadaan dimana pemerintah daerah (*agent*) mengetahui lebih banyak tentang kondisi internal instansi dari pada masyarakat (*principal*). Pemerintah daerah bertanggungjawab atas APBD atau pengelolaan keuangannya dengan memberikan hasil keuangan kepada publik yang kemudian digunakan oleh publik untuk mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan termasuk mengelola keuangan daerah. Pemerintah tidak dapat menyiapkan laporan keuangan secara lengkap serta konsisten karena suatu motif tertentu sehingga terjadi asimetri informasi (Nauw, 2021).

Keterkaitan teori ini dengan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konflik antara pemerintah daerah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* dalam pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan lembaga yang dapat dipercaya untuk melayani publik dan sebagai penampung aspirasi masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dapat terlaksana semaksimal mungkin sesuai dengan harapan masyarakat sebagai *principal*.

Intergovernmental Revenue

Intergovernmental Revenue merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan kepada daerah sesuai dengan aturan yang ada dipemerintah pusat untuk

membantu membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah agar tercapainya perimbangan dalam kesejahteraan daerah. *Intergovernmental revenue* di Indonesia dikenal dengan dana perimbangan. Dengan adanya dana perimbangan ini memotivasi pemerintah daerah agar kinerja keuangan semakin baik karena pemberian dana perimbangan ini akan dipantau oleh pusat. Semakin besar dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan pemerintah daerah memaksimalkan dalam pelaksanaan program kerjanya yang akan mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal. Jika dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah tinggi maka akan menjadikan sumber pembiayaan yang cukup dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintah daerah. Sebaliknya, jika dana perimbangan yang diterima kecil maka kegiatan operasional akan mengalami kekurangan sehingga kinerja yang dihasilkan kurang optimal. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga menjadikan kinerja keuangan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Menurut Dasmara dkk. (2020), Nugroho dan Prasetyo (2018), Pratama dkk. (2022), Sukma Dian, et.al., (2021), serta Tahar dan Prayoga (2021) yang menyatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁: *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal merupakan suatu investasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

yang manfaatnya langsung maupun tidak langsung. Salah satu belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pembangunan infrastruktur, dimana jika tersedianya infrastruktur yang baik akan memberikan manfaat untuk berbagai sektor dan masyarakat akan lebih produktif sehingga akan meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan dalam daerahnya.

Belanja modal yang besar merupakan suatu gambaran dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang akan memiliki pengaruh positif kepada pertumbuhan ekonomi. Semakin besar belanja modal yang tercermin dari peningkatan infrastruktur maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Menurut Mulyani dan Wibowo (2017), Kirana dan Sulardi (2020), Sari dkk. (2020), Digdowiseiso, et.al., (2022), serta Lestari (2020) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H₂: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat Kekayaan Daerah

Tingkat kekayaan daerah dicerminkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh daerah merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Untuk itu, harus diupayakan untuk menggali potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut agar dapat memberikan pemasukan kepada daerah dan daerah mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Karena semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan capaian kinerja keuangan yang baik. Sehingga semakin tinggi kekayaan daerah yang dicerminkan oleh Pendapatan Asli Daerah semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Menurut Defitri, et.al., (2020), Nugraheni dan Adi (2020) Anggraini dkk. (2019), Dasmara, et.al., (2020), serta Wijaya (2020) yang menyatakan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H₃: Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Aset Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah dicerminkan dengan total aset daerah. Tujuan utama dari program kinerja pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan memberikan pelayanan yang optimal, sehingga diperlukan sumber daya dan fasilitas daerah yang memadai untuk keperluan tersebut. Aset yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan keuntungan berupa kemudahan dalam melaksanakan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Ukuran pemerintah daerah yang besar memberikan kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin besar ukuran pemerintah daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Rahmawaty (2020), Kirana (2020), Natoen dkk. (2019), Fitasari dan Ismawati (2020), serta Andani, et.al., (2019) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₄: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca seluruh Kabupaten di Kepulauan Nusa Tenggara pada periode 2016-2020. Dimana Kabupaten di Kepulauan Nusa Tenggara berjumlah 37 Kabupaten atau sebanyak 37x5= 185 data pengamatan. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Adapun operasionalisasi variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan (Y)	Rasio Efektivitas	Rasio
	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$ (Halim, 2007)	
Intergovernmental Revenue (X1)	Intergovernmental Revenue	Rasio
	Total Dana Perimbangan	
	Total Pendapatan	

	(Patrick, 2007)	
Belanja Modal (X2)	Belanja Modal Ln (Total Realisasi Belanja Modal) (Andirfa, 2016)	Rasio
Tingkat Kekayaan Daerah (X3)	Tingkat Kekayaan Daerah $\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$ (Dasmar et al., 2020)	Rasio
Ukuran Pemerintah Daerah (X4)	Ukuran Pemerintah Daerah Ln(Total Aset Pemerintah Daerah) (Aulia, 2020)	Rasio

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Daerah Periode 2016-2020 yang diperoleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan verifikatif yang meliputi uji asumsi klasik, regresi data panel, uji determinasi dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif

Intergovernmental Revenue

Tabel 4
Deskriptif *Intergovernmental Revenue*

	IR
Mean	0.7282
Maximum	0.9576
Minimum	0.0981
Std. Dev.	0.1400

Sumber : *Output Eviews 9.0* (Data Diolah 2022)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa :

1. Nilai *Intergovernmental Revenue* tertinggi (Maksimum) sebesar 0.9576 yang terdapat pada Kabupaten Ende pada tahun 2020. Artinya, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat.
2. Nilai *Intergovernmental Revenue* terendah (Minimum) sebesar 0.0981 yang terdapat pada Kabupaten Badung pada tahun 2019. Artinya, pemerintah daerah masih belum mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri.
3. Nilai rata-rata *Intergovernmental Revenue* (Mean) pada 37 Kabupaten di Kepulauan Nusa Tenggara dari tahun 2016-2020 adalah 0.7282.

4. Standar Deviasi *Intergovernmental Revenue* yang dihasilkan sebesar 0.1400.

Belanja Modal

Tabel 5
Deskriptif Belanja Modal

	BM
Mean	25.6353
Maximum	27.8470
Minimum	20.4720
Std. Dev.	1.2958

Sumber : *Output Eviews 9.0* (Data Diolah 2022)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Nilai Belanja Modal tertinggi (Maksimum) sebesar 27.8470 yang terdapat pada Kabupaten Badung pada tahun 2017. Artinya, pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat meningkat, seperti terus meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah.
2. Nilai Belanja Modal terendah (Minimum) sebesar 20.4720 yang terdapat pada Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2020. Artinya, anggaran pada alokasi untuk belanja modal masih kecil, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.
3. Nilai rata-rata Belanja Modal (Mean) pada 37 Kabupaten di Kepulauan Nusa Tenggara dari tahun 2016-2020 adalah 25.6353.
4. Standar Deviasi Belanja Modal yang dihasilkan sebesar 1.2958.

Tingkat Kekayaan Daerah

Tabel 6
Deskriptif Tingkat Kekayaan Daerah

	TKD
Mean	0.1149
Maximum	0.8447
Minimum	0.0114
Std. Dev.	0.1341

Sumber : *Output Eviews 9.0* (Data Diolah 2022)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Nilai Tingkat Kekayaan Daerah tertinggi (Maksimum) sebesar 0.8447 yang terdapat pada Kabupaten Badung pada tahun 2017. Artinya, tingkat kekayaan daerah yang tinggi akan mempermudah penyelenggaraan daerahnya. Dengan lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

akan memiliki kinerja yang baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat

2. Nilai Tingkat Kekayaan Daerah terendah (Minimum) sebesar 0.0114 yang terdapat pada Kabupaten Nagekeo pada tahun 2020. Artinya, Kabupaten Nagekeo dalam menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang dilihat dari pendapatan asli daerahnya sangat kecil dibandingkan keseluruhan pendapatan yang dimilikinya.
3. Nilai rata-rata Tingkat Kekayaan Daerah (Mean) pada 37 Kabupaten di Kepulauan Nusa Tenggara dari tahun 2016-2020 adalah 0.1149.
4. Standar Deviasi Tingkat Kekayaan Daerah yang dihasilkan sebesar 0.1341.

Ukuran Pemerintah Daerah

Tabel 7

Deskriptif Ukuran Pemerintah Daerah

	UPD
Mean	28.2225
Maximum	30.4955
Minimum	27.1942
Std. Dev.	0.4748

Sumber : *Output Eviews 9.0* (Data Diolah 2022)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Nilai Ukuran Pemerintah Daerah tertinggi (Maksimum) sebesar 30.4955 yang terdapat pada Kabupaten Badung pada tahun 2020. Artinya, Kabupaten Badung mampu mengoptimalkan pendapatan daerah dan pembangunan yang tepat di daerahnya sehingga total aset yang dimiliki terbilang tinggi yang akan mempermudah pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Nilai Ukuran Pemerintah Daerah terendah (Minimum) sebesar 27.1942 yang terdapat pada Kabupaten Malaka pada tahun 2016. Artinya belum optimal dalam mengelola pendapatan daerahnya serta mengalokasikan dana transfer dari pemerintah pusat untuk pembangunan sarana dan prasarana yang sifatnya menambah aset tetap. Kabupaten Malaka total aset yang dimiliki masih terbilang kecil dibandingkan dengan Kabupaten yang lain.
3. Nilai rata-rata Ukuran Pemerintah Daerah (Mean) pada 37 Kabupaten di Kepulauan Nusa Tenggara dari tahun 2016-2020 adalah 28.2225.
4. Standar Deviasi Ukuran Pemerintah Daerah yang dihasilkan sebesar 0.4748.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 8

Deskriptif Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

	KKPD
Mean	0.9490
Maximum	4.0063
Minimum	0.0708
Std. Dev.	0.4972

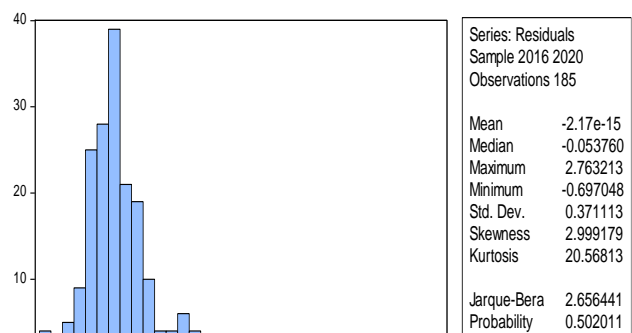
Sumber : *Output Eviews 9.0* (Data Diolah 2022)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tertinggi (Maksimum) sebesar 4.0063 (401%) yang terdapat pada Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2017. Artinya, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terendah (Minimum) sebesar 0.0708 (7%) yang terdapat pada Kabupaten Manggarai pada tahun 2020. Artinya, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai atau kurang dari target penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Nilai rata-rata Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Mean) pada 37 Kabupaten di Kepulauan Nusa Tenggara dari tahun 2016-2020 adalah 0.9490.
4. Standar Deviasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan sebesar 0.4972

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber : *Output Eviews 9.0* (Data Diolah 2022)

Gambar 1

Hasil Uji Normalitas

Dari gambar di atas menunjukkan hasil uji normalitas bahwa nilai *probability* atau *p-value* adalah $0.5020 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data yang digunakan berdistribusi normal dan model regresi memenuhi uji normalitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 9
Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Uncentered VIF	Centered VIF
C	8040.571	NA
IR	7420.309	2.0881
BM	11.4508	6.5866
TKD	505.8216	1.2822
UPD	160.1395	5.6788

Sumber : *Output Eviews 9.0 (Data Diolah 2022)*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk masing-masing nilai VIF untuk variabel X_1 2.0881, nilai VIF X_2 6.5866, nilai VIF X_3 1.2822, nilai VIF X_4 5.6788. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan semua nilai *Variance Inflating Factor* (VIF) < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 10

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.2055	Prob. F(4,180)	0.3101
Obs*R-squared	4.8266	Prob. Chi-Square(4)	0.3056

Sumber : *Output Eviews 9.0 (Data Diolah 2022)*

Dari tabel di atas hasil uji breusch pagan godfrey diatas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, karena nilai *Prob Chi Square Obs*R squared* sebesar $0.3056 > 0,05$ maka H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 11

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Obs*R-squared	2.1032	Prob. Chi-Square(2)	0.3494
---------------	--------	---------------------	--------

Sumber : *Output Eviews 9.0 (Data Diolah 2022)*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *Prob. Chi Square Obs*R-squared* $0.3494 > 0,05$. Maka H_0 diterima yang artinya bahwa data yang digunakan tidak terdapat korelasi serial dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Regresi Data Panel

Dari hasil estimasi model data panel bahwa model yang terpilih menggunakan model *fixed effect* sehingga dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

Tabel 12

Hasil Estimasi Model *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	14.09020	4.4955	0.0000
IR?	0.6529	3.1983	0.0015
BM?	0.1826	7.0820	0.0000
TKD?	0.3611	8.8302	0.0000
UPD?	0.6913	3.7742	0.0002
Fixed Effects			
(Cross)			
ALR--C	0.446716		
BDG--C	-6.124589		
BELU--C	0.198404		
BGLI--C	-0.124376		
BLLG--C	-0.366657		
BMA--C	0.433202		
DMPU--C	0.169929		
ENDE--C	0.388460		
FLRSTMR--C	0.286842		
GNYR--C	-2.458134		
JMBRN--C	0.192640		
KLGKG--C	-0.626914		
KPG--C	0.438748		
KRGASM--C	-0.446470		
LMBKTGH--C	0.443630		
LMBKTMR--C	0.243651		
LMBKUTR--C	-0.389072		
LMBT--C	0.150155		
LMKBRT--C	-0.317341		
MGGRBRT--			
C	0.067030		
MGGRI--C	0.359265		
MGGRTMR--			
C	0.577083		
MLK--C	0.414648		
NGD--C	0.509205		
NGKO--C	0.923546		
RTNDAO--C	0.631319		
SBURJUA--C	-0.177858		

SKA--C	0.106564
SMBBRT--C	-0.005301
SMBRTDY--C	0.597344
SMBTGH--C	0.631025
SMBTMR--C	0.440974
SMBW--C	0.475017
SMBWBRT--	
C	1.095790
TBNN--C	-0.576617
TMRTGSLT--	
C	0.629491
TMRTGUT--C	0.762651

Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber : *Output Eviews 9.0 (Data Diolah 2022)*

Interpretasi Model

Berdasarkan uji chow dan uji hausman, model terbaik yang didapat yaitu model *fixed effect*. Maka hasil estimasi dengan menggunakan model *fixed effect* dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = 14.09020 - 6.124589_{BDG} - 0.124376_{BGLI} - 0.366657_{BLLG} - 2.458134_{GNYR} + 0.192640_{JMBRN} - 0.446470_{KRGASM} - 0.626914_{KLGKG} - 0.576617_{TBNN} + 0.433202_{BMA} + 0.169929_{DMPU} - 0.317341_{LMBKBRT} + 0.443630_{LMBKTGH} + 0.243651_{LMBKTMR} + 0.475017_{SMBW} + 1.095790_{SMBWBRT} - 0.389072_{LMBKUTR} + 0.446716_{ALR} + 0.198404_{BELU} + 0.388460_{ENDE} + 0.286842_{FLRSTMR} + 0.438748_{KPG} + 0.150155_{LMBT} + 0.359265_{MGGRI} + 0.509205_{NGD} + 0.106564_{SK} - 0.005301_{SMBBRT} + 0.440974_{SMBTMR} + 0.629491_{TMRTGSLT} + 0.762651_{TMRTGUT} + 0.631319_{RTNDAO} + 0.067030_{MGGRBRT} + 0.923546_{NGKO} + 0.597344_{SMBRTDY} + 0.631025_{SMBTGH} + 0.577083_{MGGRTMR} - 0.177858_{SBURJUA} + 0.414648_{MLK} + 0.652900_{IR} + 0.182610_{BM} + 0.361101_{TKD} + 0.691347_{UPD} + \epsilon_{it}$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 13

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R_2)
Cross-section fixed (dummy variables)

Adjusted R-squared 0.7483

Sumber : *Output Eviews 9.0 (Data Diolah 2022)*

Berdasarkan tabel diatas untuk model penelitian ini menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.7483, yang artinya bahwa 74,83% perubahan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh

variabel *Intergovernmental Revenue*, Belanja Modal, Tingkat Kekayaan Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya 25,18% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model

Tabel 14

Hasil Uji Kelayakan Model
Cross-section fixed (dummy variables)

F-statistic 9.4776 Prob(F-statistic) 0.000

Sumber : *Output Eviews 9.0 (Data Diolah 2022)*

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai f hitung sebesar 9.4776. dengan tingkat signifikan 0.000, nilai F_{tabel} 2,65. Maka untuk $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($9.477624 > 2,65$) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya model layak digunakan. Dengan demikian *intergovernmental revenue*, belanja modal, tingkat kekayaan daerah dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Uji Hipotesis

Tabel 15

Hasil Uji t

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	14.0902	4.4954	0.0000
IR?	0.6529	3.1983	0.0015
BM?	0.1826	7.0820	0.0000
TKD?	0.3611	8.8302	0.0000
UPD?	0.6913	3.7742	0.0002

Sumber : *Output Eviews 9.0 (Data Diolah 2022)*

- Dari tabel di atas dapat dilihat nilai t_{hitung} untuk *Intergovernmental Revenue* adalah sebesar 3.1983 sementara nilai t_{tabel} sebesar 1.6532. Jika dibandingkan nilai $3.1983 > 1.6532$ dengan nilai profitabilitas $0.0015 < 0,05$ artinya H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- Dari tabel di atas dapat dilihat nilai t_{hitung} untuk Belanja Modal adalah sebesar 7.0820 sementara nilai t_{tabel} sebesar 1.6532. Jika dibandingkan nilai $7.0820 > 1.6532$ dengan nilai profitabilitas $0.00 < 0,05$ artinya H_a diterima. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

- Dari tabel di atas dapat dilihat nilai t_{hitung} untuk Tingkat Kekayaan Daerah adalah sebesar 8.8302 sementara nilai t_{tabel} adalah sebesar 1.6532. Jika dibandingkan nilai $8.8302 > 1.6532$ dengan nilai profitabilitas $0.0000 < 0,05$ artinya H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- Dari tabel di atas dapat dilihat nilai t_{hitung} untuk Ukuran Pemerintah Daerah adalah sebesar 3.7742 sementara nilai t_{tabel} sebesar 1.6532. Jika dibandingkan nilai $3.7742 > 1.6532$ dengan nilai profitabilitas $0.0002 < 0,05$ artinya H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pembahasan

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *Intergovernmental revenue* maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* di Indonesia dikenal dengan dana perimbangan. Dengan adanya dana perimbangan ini memotivasi pemerintah daerah agar kinerja keuangan semakin baik karena pemberian dana perimbangan ini akan dipantau oleh pusat. Semakin besar dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga pemerintah daerah memaksimalkan pelaksanaan program kerjanya yang akan mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka semakin baik pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga menjadikan kinerja keuangan pemerintah

daerah juga semakin meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan *Agency Theory* bahwa pemerintah daerah harus bisa memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah harus lebih memperhatikan pengalokasian dana perimbangan, dimana jika pengalokasian dana perimbangan dialokasikan dengan baik maka akan menjadikan sumber pembiayaan yang cukup dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintah daerah. Penelitian ini di dukung oleh penelitian Dasmar dkk. (2020), Nugroho dan Prasetyo (2018), Pratama dkk. (2022), Sukma Dian, et.al., (2021), serta Tahar dan Prayoga (2021) yang menyatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi belanja modal maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal merupakan suatu investasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya langsung maupun tidak langsung. Salah satu belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pembangunan infrastruktur, dimana jika tersedianya infrastruktur yang baik akan memberikan manfaat untuk berbagai sektor dan masyarakat akan lebih produktif sehingga akan meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan dalam daerahnya. Belanja modal yang besar merupakan suatu gambaran dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang akan memiliki pengaruh positif kepada pertumbuhan ekonomi. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa semakin besar belanja modal yang tercermin dari peningkatan infrastruktur maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan *Agency Theory* bahwa pemerintah daerah harus mengelola keuangan dengan tepat termasuk dalam mengelola belanja modal, pemerintah daerah harus lebih memerhatikan

pengalokasian belanja modal, dimana apabila belanja modal dialokasikan dengan maksimal maka akan memberikan manfaat secara langsung oleh masyarakat dan akan memacu pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini di dukung oleh penelitian Mulyani dan Wibowo (2017), Kirana dan Sulardi (2020), Sari dkk. (2020), Digdowiseiso, et.al., (2022), serta Lestari (2020) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji t diketahui bahwa variabel Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pengaruh signifikan disini artinya bahwa penelitian ini dapat digeneralisasikan pada seluruh populasi. Ini dapat dilihat dalam peningkatan PAD yang merupakan akses sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jumlah kenaikan kontribusi PAD dapat menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan aset dan kekayaan yang besar maka akan terpenuhi sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja pemerintah daerah. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa semakin besar tingkat kekayaan daerah semakin baik juga kinerja yang dilakukan pemerintah daerah dan sebaliknya semakin kecil tingkat kekayaan daerah maka semakin menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sesuai dengan *Agency Theory* bahwa pemerintah daerah harus mengelola keuangan dengan tepat termasuk dalam mengelola pendapatan asli daerah, dimana apabila pendapatan asli daerah besar maka akan digunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut secara berperan serta dalam mengelola sumber daya yang ada di daerahnya, dengan begitu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan akan lebih baik.

Penelitian ini di dukung oleh penelitian Defitri, et.al., (2020), Nugraheni dan Adi (2020) Anggraini dkk. (2019), Dasmara, et.al., (2020), serta Wijaya (2020) yang menyatakan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji t diketahui bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pengaruh signifikan disini artinya bahwa penelitian ini dapat digeneralisasikan pada seluruh populasi. Tujuan utama dari program kerja Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, maka diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, sumber daya dan fasilitas yang baik didukung dengan adanya aset yang besar. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa semakin besar aset daerah maka akan memberikan yang lebih baik kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dan sebaliknya semakin kecil aset daerah maka semakin menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sesuai dengan *Agency Theory* bahwa pemerintah daerah akan mengoptimalkan aset yang dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Sehingga dalam melayani masyarakat dapat terlaksana secara maksimal sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat.

Penelitian ini di dukung oleh penelitian Rahmawaty (2020), Kirana (2020), Natoen dkk. (2019), Fitasari dan Ismawati (2020), serta Andani, et.al., (2019) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *Intergovernmental Revenue* maka semakin baik juga kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.
2. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerimaan belanja modal maka semakin baik juga kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut

3. Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin baik juga kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.
5. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi aset daerah maka semakin baik juga kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Implikasi dan Keterbatasan

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah di uraikan di atas maka implikasi dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi sehingga menjadi salah satu acuan dalam menilai suatu daerah serta menjadi masukan dan bahan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat mengurangi angka kecurangan yang terjadi pada pemerintah daerah.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah berdasarkan nilai *Adjusted R-Squared* dalam penelitian sebesar 74,82% sehingga untuk penelitian selanjutnya agar menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah diluar variabel independen dalam penelitian ini seperti opini audit, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif dan sebagainya. Selain itu, disarankan dapat menggunakan objek yang berbeda, agar dapat memperluas populasi penelitian, jumlah sampel yang lebih besar, dan periode waktu yang lebih panjang agar dapat memperluas wawasan sehingga dapat menambah ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, Basri & Majid. (2016). Pengaruh Belanja Modal , Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. 5(3).
- Aulia, Rafika & Rahmawaty. (2020). Pengaruh Kemakmuran Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol 5, No 4, 584-598
- Aswar, Khoirul. (2019). Financial Performance of Logical Governments in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*.4(6)
- Bambang Jatmiko. Handi Y, L. (2016). Good Governance Government and Effect on Local Government Performance (Survey on Gunung Kidul District Government Indonesia). *International Journal of Applied Bussiness and Research (IJABER)*. Vol 14, No 14, 2016, 981-997
- Darwanis, & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183–199.
<https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3628>
- Dasmar, T., Basri, Y. M., & Novita Indrawati. (2020). *Jurnal Al-Iqtishad*. 16 (2)
- Dermawan Wibisono. 2005. *Metode Penelitian & Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika
- Dharmawati, M. K., & Irmadariyani, R. (2016). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1–5
- Ernawati, & Jaeni. (2018). Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2015-2017) Ernawati. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 73–81
- Ghozali, Imam . 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam . 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam . 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarti. 2012. *Dasar-dasar ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat
- Gustianra, Vegy & Serly Vanica. (2019). Pengaruh *Good Government Governance* dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja

- Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 1(3), 1426-1442
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Karno, D. K. S., & Alliyah, S. (2021). The Influence Of Local Government Characteristic and BPK Audit Opinion On The Financial Performance Of District/City Governments In Province Jawa tengah. *Jurnal Inspirasi Ekonomi*, 3(1), 40–55
- Mahsun, Sulistiyowati & Purwanugraha, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mahsun, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mustikarini, Widya Astuti dan Debby Fitriyani. (2012). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*
- Nauw, E. T. (2021). Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Novia, R., & Kartim. (2019). Daerah Keuangan Pemerintah dimiliki dapat mendukung kinerja pemerintah daerah . Aset yang besar. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, 1(1).
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analysis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 19–42.
- Patrick, Patricia A. (2007). *The Determinants of Organizational Inovativeness: The Adpotion of GASB 34 in Pennsylvania Local Government . Unpublished Ph.D Dissertation*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun (2011) Pasal 1 Ayat 37 (Perubahan Kedua Dari Permendagri No. 13 Tahun (2006)) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 23 Mei (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (2011) Nomor 310. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun (2014) tentang *Pemerintah Daerah*
- Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*. Vol 7 No. 13: 83-112
- Priyanto. (2012). Belajar Cepat Olah Data Statistik Dengan SPSS. Yogyakarta: Cv Andi Offest
- Putra, Andi Permana, Akram, dan Hermanto. 2018. Determinasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Kabupaten Lombok Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 2(2):271
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Sukma, A. N. P. G., & Panji, I. B. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2015). *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080–1110
- Sukma, D., Putri, A. M., & Ahyaruddin, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal IAKP*, 2(1). <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.003>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta
- Tahar, Afrizal & Prayoga. (2021). Pengaruh Tata Kelola Publik, Intergovernmental Revenue, dan Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Unesa*. 9(2)
- www.djpk.kemenkeu.go.id

www.bps.go.id